

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perjalanan kemerdekaan negara Indonesia telah berlangsung kurang lebih 70 tahun kemerdekaan. Pernyataan yang pertama kali muncul untuk mengatur format wilayah negara Indonesia adalah “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik” (Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945). Pernyataan tersebut merupakan konsekuensi logis bahwa sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan cikal bakal lahirnya otonomi daerah. Sebagai dasar hukum untuk mengatur pelaksanaan otonomi daerah dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan sebagai berikut :

Pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (2)). Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 18 ayat (5)).

Dari pernyataan di atas bahwa pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan

oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahan daerah dalam sistem administrasi negara Indonesia maka sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia telah mengeluarkan berbagai Undang-Undang tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan keseriusan pemerintah pusat dalam menyongsong pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan begitu setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu relatif terhadap daerah-daerah lainnya. Bahkan dilihat dari segi potensinya keunggulan tersebut bisa bersifat mutlak, misalnya yang berasal dari aspek lokasi atau pun anugerah sumber (*factor endowment*). Namun kesempatan atau peluang baru ini, bukan sesuatu yang otomatis terealisasi. Beberapa prasyarat dibutuhkan untuk menyiapkan daerah-daerah menjadi pelaku aktif di kancah pasar global menurut *Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park* (2001: 2) adalah sebagai berikut :

- a. Terjaminnya pergerakan bebas dari seluruh faktor produksi, barang dan jasa di dalam wilayah Indonesia, kecuali untuk kasus-kasus yang dilandasi oleh argumen nonekonomi.
- b. Proses politik yang juga menjamin keotonomian masyarakat lokal dalam menentukan dan memperjuangkan aspirasi mereka melalui partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak kepada publik.
- c. Tegaknya *good governance*, baik di pusat maupun di daerah, sehingga otonomi daerah tidak menciptakan bentuk-bentuk KKN baru.
- d. Keterbukaan daerah untuk bekerjasama dengan daerah-daerah lain tetangganya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada.
- e. Fleksibilitas sistem insentif.
- f. Peran pemerintah daerah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alam sekitar, bukan regulator dalam pengertian serba mengatur.

Dari uraian di atas fokus yang peneliti analisis adalah perhatian khusus dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah salah satu aspeknya yaitu dalam penataan daerah sebagai pembentukan daerah baru. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah.

Salah satu aspek untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan otonomi daerah adalah kemandirian daerah dan masyarakatnya. Berbicara mengenai kemandirian masyarakat aspek yang penting untuk tercapainya kemandirian adalah mutu manusia Indonesia. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang menurut Al-Muchtar (2015, hlm. 75) adalah

kualitas manusia Indonesia dipersoalkan pada melunturnya nilai-nilai kemandirian, membudayanya nilai-nilai korupsi, melemahkannya semangat kerja keras, pantang menyerah, semangat kejuangan yang dapat melahirkan pasrah terhadap keadaan apatis, menghindari kesulitan, ingin selalu mendapatkan "kebijaksanaan" sekalipun melanggar kesepakatan umum. Gejala-gejala ini perlu ditangani secara serius dalam usaha membina dan meningkatkan mutu manusia Indonesia masa kini dan mendatang.

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa sebenarnya telah lama disadari tentang dimensi krisis pendidikan yang lebih terfokus pada krisis kemandirian peserta didik maupun keluaran sekolah, mahasiswa, bahkan lulusan perguruan tinggi. Secara substantif-edukatif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus ditujukan untuk menghasilkan manusia dewasa Indonesia yang "beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab". Sebagaimana digariskan sebagai

tujuan pendidikan nasional aspek kemandirian merupakan salah satu aspek penting dalam rumusan yang hendak dicapai oleh bangsa kita. Selanjutnya dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”

Pendidikan formal lebih diarahkan pada sistem pendidikan yang ada di sekolah. Pendidikan nonformal lebih diarahkan untuk membina, membimbing generasi muda dalam mengembangkan kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan untuk menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan pendidikan informal lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai kebiasaan dalam keluarga, tata krama dalam keluarga, kerukunan, persaudaraan yang membentuk kekuatan diri baik secara individu, dalam komunitas keluarga serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam jalur pendidikan yang telah di uraikan di atas pesantren merupakan kelembagaan islam yang masuk ke dalam pendidikan formal dan non formal. Menurut Rofiq A,dkk (2001, hlm 4) mengatakan bahwa

pesantren sebagai pendidikan nonformal seperti pesantren tradisional, majelis taklim, sarekat tolong menolong, dan majelis kultum. Sedangkan jalur pendidikan pesantren formal adalah pesantren yang memiliki metode dan model pembelajaran yang sudah permanen.

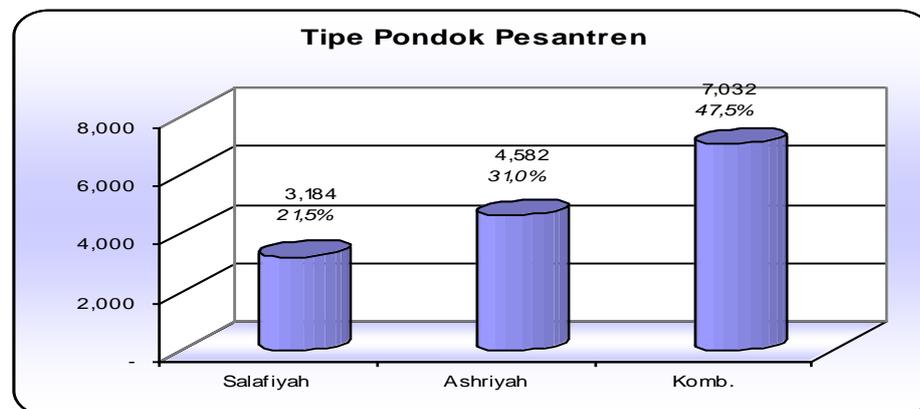
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pesantren yang bersifat non formal adalah pesantren yang dalam memberikan pembelajaran masih bersifat tradisional. Sedangkan pesantren yang termasuk ke dalam lembaga formal adalah pesantren yang sudah memiliki sistem pembelajaran yang sama halnya dengan sistem pembelajaran di persekolahan.

Pesantren merupakan sistem pendidikan yang sudah berkembang jauh sebelum negeri ini merdeka. Pendidikan yang sering disebut tradisional ini bersama madrasah dan pendidikan swasta nasional lainnya, telah berjasa besar dalam menumbuhkan masyarakat swadaya dan swasembada masyarakat. Inilah yang kemudian hari bersama kekuatan sosial lainnya menjadi tulang punggung dan basis perjuangan kemerdekaan. Pengembangan apapun yang dilakukan dan di

jalani oleh pesantren tidak mengubah ciri pokoknya sebagai lembaga pendidikan. Sistem pendidikan pesantren didasari oleh nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada ajaran dasar agama Islam. Hal inilah yang mendasari konsep pembangunan dan peran kelembagaan pesantren.

Berdasarkan data Harian Republika pada tahun 2013 jumlah pondok pesantren di Indonesia berjumlah 27.230 ribu dan 2014 menjadi 29.535 ribu. Peningkatan jumlah pondok pesantren ini menunjukkan keseriusan semua pihak untuk mencetak anak didik yang memiliki bekal pendidikan keagamaan yang tinggi dan mampu menjadi kader ulama. Pondok pesantren memiliki kontribusi terhadap pembinaan nilai-nilai Islam di Indonesia. Karena itu, pondok pesantren mampu memainkan peran signifikan dalam menciptakan tatanan sosial kemasyarakatan yang damai, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Peneliti juga mendapatkan data bahwa perkembangan pesantren di Indonesia pada tahun 2004-2005 dari seluruh 33 propinsi jumlah pondok pesantren di Indonesia sebanyak 14.798 ribu. Adapun pondok pesantren tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.1
Tipe Pondok Pesantren di Indonesia

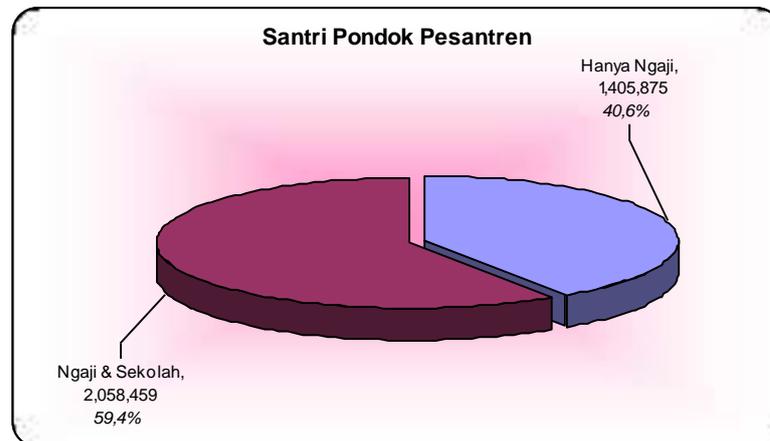


Sumber : Diolah Penulis Tahun 2016

Berdasarkan tipe pondok pesantren di atas terdapat sebanyak 3.184 (21,5%) merupakan Pondok Pesantren Salafiyah, dan 4.582 (31,0%) Ashriyah, serta 7.032 (47,0%) sebagai Pondok Pesantren Kombinasi. Jumlah santri secara keseluruhan sebanyak 3.464.334, terdiri dari 1.763.777 (50,9%) santri mukim, dan 1.700.557 (49,1%) santri tidak mukim. Berdasarkan aktivitas belajar di Pondok Pesantren,

40,6% santri hanya ngaji, dan 59,4% santri ngaji dan sekolah. Adapun data santri di seluruh Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.2
Jumlah Santri di Indonesia Tahun 2004-2005



Sumber : Diolah Penulis Tahun 2016

Dari data jumlah santri di atas pondok pesantren yang ada di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar sebagai bagian *civil society* dalam memfungsikan atau mengembangkan perannya sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan dan pengabdian masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Fungsionalisasi ini merupakan bukti partisipasi yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan *good governance* dan mencapai tujuan utama otonomi daerah yaitu kemandirian daerah dan masyarakat.

Dengan banyaknya jumlahnya pondok pesantren yang berkembang di Indonesia tentunya semua pesantren di Indonesia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Penulis mengambil beberapa sampel pesantren yang ada di Indonesia. Adapun hasil dari analisis penulis bahwa kelebihan dan kekurangan pondok pesantren yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keunggulan dan Kelemahan Pesantren di Indonesia

No	Nama Pondok Pesantren	Jumlah Santri	Keunggulan	Kelemahan
1	Pesantren Sidogiri	7000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegiriman dai ke daerah-daerah minus agama 2. Program nyantri kembali yang di selenggarakan oleh majelis alumni 3. Konsultasi masalah agama. 4. Syiar agama melalui buletin maupun majalah sidogiri 5. Berkembangnya BMT di 140 cabang di seluruh Indonesia 6. Pendistribusian air minum dengan merk santri 7. Kopontren dengan manajemen modern yang tesebar mencapai 120 cabang di Indonesia 8. Pengelohan limbah sampah 9. Pelatihan maupun diklat kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen pengelolaan pondok pesantren. 2. Kaderisasi pondok pesantren 3. Belum kuatnya budaya demokrasi dan disiplin, hal ini berkaitan erat dengan pondok pesantren yang independen
2	Pesantren Lirboyo	8000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem mondokan yang memungkinkan pendidikan 2. Keakraban (hubungan personal) antara santri dengan kyai dan antara santri dengan santri sangat kondusif bagi pemerolehan pengetahuan yang hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih menekan kepada ilmu fiqh, tasawuf, dan ilmu alat 2. Adanya penurunan kualitas dan kuantitas pesantren salaf 3. Penggunaan metoda belajar yang masih bersifat tradisional seperti sorongan, bandugan

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Kemampuan pesantren dalam menciptakan lulusan yang memiliki kemandirian 4. Kesederhanaan pola hidup 5. Biaya pendidikan yang murah 	<p>(<i>halaqah</i>) dan wetonan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peran kyai yang dominan dan sumber utama dalam pembelajaran.
3	Pesantren Sunan Drajat Lamongan	4000	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT SDL (sunan draja lamongan) bergerak dalam bidang produksi pupuk <i>phosphate</i> alam dan jasa kontraktor 2. Koperasi pondok (koppotren) yaitu terdiri dari warnet, kantin dan beberapa usaha kecil yang kini menjadi usaha yang mandiri 3. Pengembangan Jus Mengkudu “Sunan” 4. Pembuatan Air minum kemasan “Aidrat” 5. Peternakan sapi dan kambing 6. Radio Persada FM 101, 6 MHz 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kapasitas mesin dalam memproduksi pupuk 2. Terbatasnya distribusi air hanya kalangan pondok dan masyarakat di sekitar pondok saja 3. Kurangnya minat masyarakat khususnya di sekitar pondok untuk ikut serta bergabung dengan koperasi
4	Pesantren Ploso Kediri	6000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketakziman seorang santri terhadap kyainya begitu kental 2. Tempat mencetak kader-kader islam yang barakhlakul karimah dan mempuni terhadap terhadap kajian-kajian agama seperti ilmu fiqh, tasawuf atau pun ilmu alat 3. Sebagai sentral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya sikap membangun sikap <i>tamaddun</i> yaitu bagaimana memajukan pesantren yang sebenarnya manajemen dan administrasi masih bersifat kekeluargaan 2. <i>Tsaqafah</i> bagaimana memberikan

			<p>ilmu agama</p> <p>4. Tempat pendidikan yang taat megenal strata sosial</p>	<p>pencerahaan kepada umat islam agar kreatif-produktif, dengan tidak meninggalkan orisionalitas ajaran islam</p> <p>3. <i>Hadharah</i>, kurangnya membangun budaya dalam hal ini bagaimana budaya kita dapat diwarnai oleh jiwa dan tradisi islam. Di mana pesantren plosu di harap mampu megembangkan dan mempegaruhi tradisi yang bersemangat islam di tengah hembusan dan pegaruh dahsyat globalisasi</p>
5	Pesantren Al – Itiffaq Rancabali Bandung	2000	<p>1. Pesantren Al- Itiffaq dapat membangun model bisnis melalui proses terpadu dan berkesinambungan yang dapat di sebut sebagai pembudayaan ekonomi bisnis meliputi penanaman nilai pembiasaan, peneladanan dan pegalaman</p> <p>2. Keunggulan dan keberhasilan daya saing entitas bisnis pesantren</p> <p>3. Model bisnis berbasis ukhuwah</p>	<p>1. Adanya penggunaan sains dan teknologi dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah Rancabali yang mempengaruhi lahirnya pola komunikasi, interaksi dan sistem pelayanan publik</p> <p>2. Masuknya budaya modern yang bercorak materialistik</p> <p>3. Meningkatnya</p>

			dapat megantarkan pesantren dan masyarakat pada keberdayaan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang baik	tuntutan publik untuk mendapatkan perlakuan yang semakin adil. 4. Adanya kebijakan pasar bebas yang memasukan pendidikan sebagai komoditas yang di perdagangkan
6	Pondok Modern Darusalam Gontor	7000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kyai sebagai pemimpin 2. Pesantren memiliki akses dengan lembaga-lembaga di luar negeri 3. Memiliki konsumen langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pemisahan antar yayasan pimpinan madrasah guru dan staf administrasi 2. Tidak ada transparansi pengelolaan sumber keuangan 3. Belum terdistribusinya peran pengelola pendidikan 4. Banyaknya peyelenggaraan administrasi yang tidak sesuai standar serta unit-unit kerja tidak berjalan sesuai aturan baku organisasi
7	Pesantren Riyadlul jannah	4000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guna membekali santri dalam kehidupan bermasyarakat di bentuk jiwa kedisiplinan dan kreatifitas yang diadakan taklim khitabah, pembacaan tahlil, istiqhosah 2. Program <i>tahfidzul</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Multi peran pegurus menyebabkan kerja dan konsentrasi kurang maksimal 2. Menghadapi berbagai problem yang ada pada masyarakat 3. Kurangnya partisipasi dari masyarakat

			<p>Quran yang telah berjalan 3 tahun</p> <p>3. Sedangkan dalam ekstrakurikuler, dalam bahasa inggris, pertanian, perikanan, menjahit (khusus putri)</p>	<p>4. Kurangnya sarana yang memadai</p> <p>5. Banyaknya peyelenggaraan administrasi yang tidak sesuai standar serta unit-unit kerja tidak berjalan sesuai aturan baku organisasi</p>
--	--	--	---	--

Sumber: Diolah Penulis Tahun 2016

Adapun hasil dari analisis penulis bahwa kelebihan dan kekurangan pondok pesantren yang ada di Indonesia berdasarkan tipe pondok pesantren adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Keunggulan dan Kelemahan Tipe Pesantren di Indonesia

No	Tipe Pondok Pesantren	Keunggulan	Kelemahan
1	Pesantren Salaf	<ul style="list-style-type: none"> • Ketakdziman seorang santri terhadap kyainya begitu kental • Tempat mencetak kader-kader islam yang berakhlakul karimah dan mumpuni terhadap kajian-kajian agama seperti ilmu fiqh, tasawuf ataupun ilmu alat • Sebagai tempat sentral belajar ilmu agama • Tempat pendidikan yang tak mengenal strata sosial • Mengajarkan semangat kehidupan demokrasi, bekerja sama, persaudaraan, persamaan, percaya diri dan keberanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Menutup diri akan perubahan zaman, dan bersifat kolot dalam merespon modernisasi • Lebih menekankan ilmu fiqh, tasawuf dan ilmu alat • Adanya penurunan kualitas dan kuantitas pesantren salaf • Penggunaan metode pembelajaran yang masih bersifat tradisional seperti sorogan, bandungan (halaqah), wetonan • Kurangnya penekanan kepada aspek pentingnya membaca dan menulis • Peran kyai yang dominan dan sumber utama dalam pembelajaran

Zulkifli, 2016

PENGUATAN ECONOMIC CIVIC DALAM MEMBENTUK KEMANDIRIAN SANTRI SEBAGAI WUJUD GOOD GOVERNANCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

		hidup	
2.	Pesantren Modern	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang takdzimnya santri kepada kyai, karena santri lebih patuh pada peraturan pesantren • Ketatnya peraturan-peraturan yang dibuat, yang menyebabkan ketidaknyamanan santri dalam belajar • Ilmu-ilmu agama yang diberikan tidak lagi diberikan secara intensif • Terdapatnya kecenderungan santri yang semakin kuat untuk mempelajari IPTEK • Tradisi “ngalap berkah kyai” sudah tidak lagi menjadi fenomena dalam pesantren 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perubahan yang signifikan dalam sistem, metode serta kurikulumnya • Mau membuka tangan untuk menerima perubahan zaman • Semangat untuk membantu perkembangan pendidikan di Indonesia tidak hanya dalam pendidikan agama saja • Dibangunnya madrasah-madrasah bahkan perguruan tinggi guna mengembangkan pendidikan baik agama ataupun umum dalam lingkungan pesantren • Mampu merubah sikap kekolotan pesantren yang terdahulu menjadi lebih fleksibel • Perubahan terhadap keluarannya tidak hanya menjadi seorang guru ngaji, ataupun guru agama di desa. Sekarang merambah ke dalam dunia politik, ekonomi dan beberapa bidang lainnya

Sumber : Diolah Penulis Tahun 2016

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pesantren salaf masih terkenal dengan kekolotan dan ketradisionalannya dalam mengembangkan agama islam, akan tetapi para santrinya sangat mumpuni dalam hal agama. Sedangkan dalam pesantren modern keseimbangan antara ilmu umum dan agama sudah cukup baik dan diharapkan dengan adanya pesantren modern mampu menciptakan cendekiawan muslim dalam kancah dunia pendidikan kita. Pesantren salaf ataupun

Zulkifli, 2016

PENGUATAN ECONOMIC CIVIC DALAM MEMBENTUK KEMANDIRIAN SANTRI SEBAGAI WUJUD GOOD GOVERNANCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

modern pada zaman ini memiliki tantangan yang lebih seiring dengan modernisasi di Indonesia, untuk itu perlu adanya sikap-sikap yang cerdas untuk menghadapinya. Bagi ponpes modern kiranya tidak begitu rumit, hanya saja perlu adanya kontroling dan monitoring dalam mengamati arus modernisasi agar keseimbangan agama dan ilmu umum tetap berjalan sesuai kadarnya.

Pengembangan peran pesantren dalam memberdayakan masyarakat merupakan salah satu upaya penting untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan karena pemerintah masih menghadapi berbagai masalah kultural dan struktural, serta pihak swasta yang cenderung masih melakukan penyimpangan untuk memperoleh keuntungan secara sepihak. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan merupakan pendekatan yang relevan untuk memperkuat peran masyarakat (*civil society*). Pemberdayaan sangat mementingkan partisipasi aktif masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk melaksanakan pembangunan yang mereka butuhkan. Dalam pemberdayaan ini, pemerintah daerah dituntut mampu mendayagunakan berbagai potensi, kekuatan dan partisipasi di masyarakatnya. Apalagi dengan keterbatasan sumber daya, kekuatan dan partisipasi masyarakat terutama NGOs (*Non Governmental Organizations*) sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan ini.

Salah satu bentuk NGOs yang paling potensial untuk berperan dalam memberdayakan masyarakat adalah pesantren. Pesantren yang umumnya dikenal sebagai lembaga pendidikan agama (Islam) telah mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Pesantren yang tersebar diseluruh Indonesia hingga pelosok pedesaan sangat berpotensi memberdayakan ekonomi rakyat. Kegiatan ekonomi pesantren yang pada dasarnya untuk memperoleh kemandirian dan mempermudah pelayanan (baik internal maupun ke masyarakatnya) merupakan modal besar yang potensial dikembangkan dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Apalagi dengan kekuatannya sebagai sebuah lembaga yang mempunyai integritas kuat dan ketersediaan sumber daya yang ada didalamnya akan mampu menjadi basis pemberdayaan ekonomi rakyat secara massif dan lebih produktif.

Pesantren mampu menjadi sebuah lembaga yang multifungsional, tidak hanya berkuat bagi perkembangan pendidikan Islam semata, namun juga sangat berperan bagi kemajuan pembangunan lingkungan sekitar yaitu pembangunan yang meliputi bidang sosial, ekonomi, teknologi dan ekologi, bahkan beberapa pesantren telah mampu untuk mengangkat kehidupan masyarakat sekitarnya (Ziemek, 1986, hlm. 23). Pondok pesantren di daerah Jawa, memiliki perbedaan dari segi kurikulum maupun dari segi ilmu yang diajarkan. Namun demikian ada unsur-unsur pokok pesantren yang harus dimiliki setiap pondok pesantren. Mastuhu (1994, hlm. 58) mengungkapkan unsur-unsur pokok sebuah pesantren, yaitu kyai, masjid, santri, pondok dan kitab Islam klasik (atau kitab kuning), adalah elemen unik yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya.

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga agama (Islam) tentu saja tidak bisa melepaskan diri dari peran pembebasan dan pemberdayaan santri, khususnya dalam bidang ekonomi, yang sejatinya adalah bagian dari integrasi dari masalah umat islam itu sendiri. Hal demikian ini diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang mengakar di masyarakat yang memiliki posisi strategi dalam upaya pengembangan umat dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan mandiri. Sebagai mana yang kita sadari semua bahwa kegiatan ekonomi yang terpusat selama ini telah menghasilkan sistem ekonomi yang merugikan masyarakat kecil. Kehidupan ekonomi mereka semakin lama bukan semakin membaik melainkan terpuruk.

Dengan demikian sebagai tuntutan agama (Islam) pesantren seharusnya megambil peran untuk ikut menangani masalah ini mengapa hal demikian penting di lakukan, sebab sangat menentukan tingkat kepedulian pesantren terhadap masyarakat, khususnya santri sekitar. Disini antara santri dan masyarakat sekitarnya sebenarnya langsung maupun tidak langsung telah terjadi interaksi timbal balik yang saling mengisi (*take and give*) satu dengan yang lain. Memang tidak bisa ditampikan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dan pesantren dam masyarakat sekitar yang umumnya masyarakat kelas bawah.

Untuk terwujudnya perekonomian yang bagus disini diperlukan manusia yang siap mendarmabaktikan seluruh hidupnya untuk perbaikan umat yaitu manusia yang sadar akan keadaan manusianya (*human condition*), kesejahteraan dan kemasyarakatan diperlukan pendidikan yang membentuk watak dan karakter manusia yang peduli tentang kondisi sosial. Peran pondok pesantren yang berfungsi sebagai lembaga yang peduli terhadap permasalahan sosial, kemudian dijadikan sebagai pijakan untuk menjadi pesantren sebagai agen perubahan (*agent of change*) terhadap masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Pondok pesantren juga merupakan lembaga perantara yang di harapkan dapat berperan sebagai dinamisor dan katalisator pembangunan masyarakat, tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang sosial ekonomi budaya.

Berdasarkan beberapa keunggulan dan kelemahan pesantren di Indonesia yang telah diidentifikasi, maka penulis sangat tertarik dengan tipe pesantren yang berbasis ekonomi yaitu pesantren yang berada di Kabupaten Bandung. Hasil pra-penelitian bahwa pesantren Al-Ittifaq adalah salah satu tipikal *eco*-pesantren yang berwawasan keislaman, berwawasan ekonomi sekaligus juga berwawasan lingkungan. Pesantren Al-Ittifaq telah memproduksi berbagai macam jenis sayuran dengan pengelolaan pasca produksi yang meliputi penyortiran, pengelompokan, pembungkusan, pengepalan, serta pemberian merek dan label. Jenis sayuran yang sudah dihasilkan sebanyak 31 macam jenis sayuran. Hasil panennya berkisar 3-4 ton per harinya. Pesantren Al-Ittifaq juga sudah menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan beberapa supermarket ternama dalam memasarkan produk-produk pertaniannya, sebuah langkah yang jarang dilakukan oleh sebuah pesantren. Dengan aktivitas agro-ekonomi yang dilakukan di Pesantren Al-Ittifaq dapat dijadikan sebagai contoh penguatan berbasis *economic civic*.

Dari hasil pra-penelitian penulis menyimpulkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang hari ini berusaha mengubah masa depan pesantren, bukan hanya mampu memproduksi kyai, da'i, ahli tafsir dan hadis serta pembaca kitab kuning, namun lebih dari itu, dengan perantara jalur pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berpengetahuan

luas, menguasai segala bidang ilmu pengetahuan dan mampu memberdayakan potensi daerah, santri, dan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan dari *Good Governance*. Kondisi seperti ini juga terjadi di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Rancabali, Bandung. Pesantren Al-Ittifaq tidak hanya memfokuskan pada penanaman nilai-nilai spiritualitas santri (*tafaqquh fi al-din*), tetapi juga fokus pada aktivitas ekonomi atau bisnis yang cukup maju bahkan menjadi model pesantren yang mandiri dan berhasil melibatkan partisipasi santri dan masyarakat. Dengan kondisi yang demikian, pesantren Al-Ittifaq melalui program-program yang diterapkan, dengan kyai di dalamnya, dapat dikatakan berperan sebagai mediator, motivator dan dinamisator bagi transformasi ilmu keagamaan dan ilmu umum atau sosial pada para santri yang terefleksikan dalam tingginya tingkat spiritualitas dan kemandirian santri serta termanifestasikan dalam bentuk perubahan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan data dan pemikiran di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penguatan kemandirian santri berbasis ekonomi pesantren. Untuk itu penulis mengangkat permasalahan ini kedalam suatu penelitian dengan judul **“Penguatan *Economic Civic* Dalam Membentuk Kemandirian Santri Sebagai Wujud *Good Governance* (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Agar permasalahan dapat diteliti secara mendalam maka dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Nilai-nilai apa saja yang ditanamkan dalam proses pembentukan kemandirian santri melalui *economic civic*?
2. Bagaimana model konseptual dan praksis penguatan *economic civic* dalam membentuk kemandirian santri sebagai wujud *good governance*?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penguatan *economic civic* dalam membentuk kemandirian santri sebagai wujud *good governance*?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penguatan *economi civic* dalam membentuk kemandirian santri sebagai wujud *good governance*.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis nilai-nilai apa saja yang ditanamkan dalam proses pembentukan kemandirian santri melalui *economi civic*
- b. Menganalisis model konseptual dan praksis penguatan *economi civic* dalam membentuk kemandirian santri sebagai wujud *good governance*
- c. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penguatan penguatan *economi civic* dalam membentuk kemandirian santri sebagai wujud *good governance*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan *economi civic* dalam membentuk kemandirian santri sebagai wujud *good governance*.

2. Secara Praktis

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintahan daerah bahwa pengembangan kemandirian daerah dan masyarakat dapat dilakukan melalui pesantren
- b. Menunjukkan kepada pemberi keputusan serta insan pendidik bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tidak hanya membentuk manusia dari segi kualitas agamanya saja namun lebih kepada aspek sosial yaitu menyiapkan generasi santri yang mandiri melalui basis ekonomi pesantren

- c. Menjadi informasi untuk memberikan rangsangan kepada masyarakat bahwa pesantren sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri.

E. Struktur Organisasi Tesis

Tesis ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, merupakan rasional yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Isi dari bab ini meliputi; latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.
- Bab II Kajian Pustaka, merupakan gambaran berbagai konsep, generalisasi dan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Isi dari bab ini meliputi; *economic civic*, pesantren, Pendidikan Kewarganegaraan, konsep nilai kemandirian, konsep *good governance*, dan penelitian terdahulu.
- Bab III Metodologi Penelitian, merupakan penjelasan yang rinci mengenai metode penelitian yang digunakan. Isi dari bab ini meliputi; pendekatan dan metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan pengujian keabsahaan data.
- Bab IV Temuan dan Pembahasan, merupakan gambaran data yang diperoleh dari lapangan untuk kemudian dianalisis menggunakan berbagai teori yang relevan. Isi dari bab ini meliputi gambaran umum hasil penelitian dan analisis hasil penelitian
- Bab V Simpulan, implikasi, dan rekomendasi merupakan jawaban dari aspek yang diteliti. Bab ini terdiri dari simpulan (umum dan khusus) serta implikasi, dan rekomendasi.